

**PEMENUHAN HAK KETENAGAKERJAAN TENAGA MEDIS
PADA PELAYANAN KESEHATAN DI KLINIK PT. PERTAMINA
GEOTHERMAL ENERGY AREA LAHENDONG MANADO**

TESIS

Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Derajat Sarjana S-2

Program Studi Magister Hukum Kesehatan



Diajukan oleh:

CHRISTIAN IGNATIUS ELIM

NIM: 21.C2.0032

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2025

ABSTRAK

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan bagi tenaga medis diatur spesifik di dalam UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hak-hak tenaga medis yang harus dilindungi, diantaranya yaitu hak atas pekerjaan, hak atas upah yang adil, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan, hak untuk diproses hukum secara sah, hak untuk diperlakukan secara sama, hak atas rahasia pribadi, hak atas kebebasan suara hati.

Pengaturan pemenuhan hak ketenagakerjaan tenaga medis dalam melakukan pelayanan kesehatan di klinik perusahaan PT. Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong Manado. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis sosiologis yang dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan Pengaturan pemenuhan hak ketenagakerjaan tenaga medis dalam melakukan pelayanan kesehatan di klinik perusahaan haruslah mengikuti aturan yang tersedia yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun profesi. Pelaksanaan pemenuhan hak ketenagakerjaan tenaga medis dalam melakukan pelayanan kesehatan di klinik perusahaan PGE Lahendong telah terpenuhi sesuai kontrak yang disetujui kedua belah pihak, namun perlu adanya pembaharuan di beberapa aspek di dalam kontrak yang disetujui oleh kedua belah pihak. Faktor penghambat pelaksanaan pemenuhan hak tenaga kerja antara lain terkait kontrak kerja yang belum disempurnakan terkait hak ketenagakerjaan tenaga medis di dalam peningkatan kompetensi yang dibutuhkan dan kurangnya SDM dengan kompetensi yang sesuai.

Kata Kunci: pelayanan kesehatan, hak ketenagakerjaan, tenaga medis

ABSTRACT

Employment development, as an integral part of national development, is based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, as stipulated in Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. For medical personnel, this is specifically regulated in Law No. 17 of 2023 concerning Health. Medical personnel rights that must be protected include the right to work, the right to fair wages, the right to association and assembly, the right to security and health protection, the right to legal proceedings, the right to equal treatment, the right to privacy, and the right to freedom of conscience.

Regulations on the fulfillment of medical personnel's labor rights in providing health services at the PT. Pertamina Geothermal Energy clinic in the Lahendong Manado area. This study uses a sociological-juridical approach and is analyzed qualitatively using primary and secondary data. Primary data was obtained directly through interviews, and secondary data was obtained from literature review.

The research results indicate that the provisions for fulfilling the labor rights of medical personnel providing healthcare services at company clinics must comply with existing regulations issued by the government and the profession. The fulfillment of the labor rights of medical personnel providing healthcare services at the PGE Lahendong company clinic has been met according to the contract agreed to by both parties. However, several aspects of the contract need to be updated. Factors hindering the fulfillment of labor rights include incomplete employment contracts regarding the labor rights of medical personnel in improving required competencies and a lack of human resources with appropriate competencies.

Keywords: health services, employment rights, medical personnel